

ANALISIS KEBUTUHAN PELATIHAN UNTUK MEMENUHI KOMPETENSI LITERASI INFORMASI PENGELOLA PERPUSTAKAAN SEKOLAH

Oleh: Riche Cynthia Johan

Program Studi Perpustakaan dan Informasi
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Pendidikan Indonesia

Abstrak

Perpustakaan tidak pernah lepas dari penyedia layanan atau bisnis yang sering disebut tenaga pengelola atau pengelola perpustakaan sekolah. Mereka harus terampil dan berdedikasi dalam mencari, mengatur dan menafsirkan informasi yang dibutuhkan oleh guru dan siswa. Tanpa seorang pengelola perpustakaan yang kompeten, perpustakaan tidak dapat beroperasi dengan baik dan efektif.

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi juga mendorong sebuah perpustakaan ke dalam dunia untuk mengenal dan menggunakan teknologi. Salah satu standar kompetensi tenaga pengelola perpustakaan sekolah adalah kompetensi dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di perpustakaan dan literasi informasi.

Kompetensi didefinisikan sebagai ukuran untuk menentukan tingkat kemampuan pengelola perpustakaan dalam menggunakan pengetahuan dan keterampilan. Persyaratan kompetensi yang terus berubah, sehingga tenaga pengelola perpustakaan harus selalu memperbaruinya.

Penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pelatihan bagi pengelola perpustakaan pada jenjang pendidikan menengah. Secara umum permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kompetensi tenaga pengelola atau pengelola perpustakaan sekolah? Pertanyaan penelitian diuraikan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah gambaran kompetensi para pengelola perpustakaan berdasarkan telaah kesesuaian dengan peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2008? (2) Bagaimanakah gambaran kebutuhan pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mereka, terutama jenis pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi literasi informasi?

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian survey. Pendekatan survei adalah salah satu pendekatan penelitian yang pada umumnya digunakan untuk pengumpulan data yang luas dan banyak. Melalui metode ini diharapkan menjawab masalah dengan menggambarkan jumlah sebenarnya tenaga pengelola atau pengelola perpustakaan dan menganalisis instrumentasi yang menggambarkan kompetensi literasi informasi yang telah dimiliki oleh pengelola perpustakaan dalam mengelola perpustakaan sekolah.

Kata Kunci: Kompetensi, Pelatihan, Literasi Informasi.

Abstract

Libraries have never escaped from the service provider or business that is often called a librarian or library administrator. For schools, the librarian must be skilled and dedicated in searching, organizing and interpreting information needed by teachers and students. Without a competent librarian, the library can not be operated properly and effectively.

Development of information and communication technologies are also pushing the world into a library for technological literacy activities. One school librarian competency standard is competence in using ICT in the library and information science.

Competence is defined as a measure to determine the level of librarians in using the knowledge and skills. Competency requirements are constantly changing, so librarians should keep them updated.

This study is a preliminary study conducted to determine the training needs of librarians in secondary education. In general, the problems posed in this study is how the competence of the teacher librarian or school library staff? The research question is described as follows: whether the competence of the librarians have been in accordance with government regulations No. 25 of 2008? Furthermore, this study also identify particular type of training that can enhance information literacy competency?

The method in this study is survey research methods. A survey research is an approach that is generally used for extensive data collection and more. Through this method are expected to answer the problem by describing the actual number of teachers and librarians that describes the instrumentation to analyze the information literacy competencies already held by the teacher librarians in managing the school library.

Kata Kunci: *Teacher Librarian, Competence, Training, Information Literacy.*

A. Pendahuluan

Perpustakaan yang diselenggarakan oleh sekolah merupakan bagian integral dari lembaga pendidikan, sebagai tempat menyimpan koleksi bahan pustaka yang diolah dan disusun secara sistematis untuk didayagunakan bagi kepentingan pemakai, siswa dan guru dalam rangka menunjang program belajar mengajar di sekolah. Berkembang dan berdayagunanya sebuah lembaga perpustakaan tentu

tidak terlepas dari adanya pengelola perpustakaan atau pustakawan yang merupakan motor penggerak kehidupan perpustakaan.

Keadaan aktual dari sebaran perpustakaan dan pengelola perpustakaan/pustakawan yang ada di Indonesia masih dalam jumlah yang tidak proporsional, berikut ini data proporsi jumlah perpustakaan sekolah dengan jumlah pustakawan (lihat tabel 1)

Tabel 1.1
Jumlah Perpustakaan dan Jumlah Pustakawan

Jenis Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan	Jumlah Pustakawan
Perpustakaan Sekolah	118.599	189
• SD	71.716	
• MI	6.716	
• SMP	19.752	
• MTS	5.634	
• MA	2.719	
• SMA	12.062	
Perpustakaan PT	2.428	1.354

Sumber: Ofy Sofiana, *Perpustakaan Nasional RI, Data Tahun 2010*.

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa rendahnya pertumbuhan perpustakaan pada lembaga pendidikan, khususnya pada tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dari 236.515 unit sekolah di seluruh Indonesia, baru 118.599 sekolah yang memiliki perpustakaan. Selain itu jumlah pengelola perpustakaan pun untuk di perpustakaan sekolah sangat minim dengan jumlah 189 orang jumlah keseluruhan pustakawan yang ada di Indonesia yaitu 3000 orang. Kondisi ini menyiratkan bahwa perhatian penentu kebijakan dalam pendidikan belum memprioritaskan (1) perpustakaan sekolah sebagai program pendidikan yang perlu diperhatikan untuk menunjang kegiatan pembelajaran, (2) jumlah serta kompetensi pengelola perpustakaan yang memadai sesuai dengan tupoksinya.

Perpustakaan tidak pernah luput dari usaha pemberi layanan atau yang

sering disebut pengelola perpustakaan. Pengelola perpustakaan adalah orang yang cakap, berdedikasi tinggi dalam mencari, mengatur dan menginterpretasikan informasi yang dibutuhkan oleh guru dan siswa. Tanpa pengelola perpustakaan yang cakap, perpustakaan tidak dapat dioperasikan dengan baik dan efektif.

Kajian penelitian tentang perpustakaan dan pengelolanya masih langka dilakukan, kepemilikan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan perpustakaan masih menjadi sesuatu yang sulit untuk bisa selaras. Hal ini mendasari adanya kebutuhan untuk menelaah dan meneliti dalam hal kompetensi para pengelola perpustakaan khususnya disekolah.

Pengembangan kemampuan literasi informasi merupakan sebuah *life skill* yang harus dikembangkan dan dimiliki oleh guru tenaga pengelola

perpustakaan. Jika ditelusur lebih dalam akan didapati penyebab dari rendahnya kemampuan literasi informasi yaitu kurang tersentuhnya kompetensi dari tenaga pengelola perpustakaan oleh kebutuhan literasi informasi dari kurikulum pendidikan perpustakaan dan yang terjadi juga belum adanya sinergi dari pemerintah dan persekolahan untuk mengembangkan sumberdaya manusia di perpustakaan untuk mengelola kemampuan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pelatihan bagi pustakawan pada jenjang pendidikan menengah. Secara umum permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kompetensi tenaga pengelola atau pengelola perpustakaan sekolah? Pertanyaan penelitian diuraikan sebagai berikut:

(1) Bagaimanakah gambaran kompetensi para pengelola perpustakaan berdasarkan telaah kesesuaian dengan peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2008?

(2) Bagaimanakah gambaran kebutuhan pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mereka, terutama jenis pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi literasi informasi?

B. Kajian Pustaka

Perundangan Tentang Perpustakaan Sekolah

Penyelenggaraan perpustakaan sekolah bukan hanya untuk mengumpulkan dan menyimpan bahan pustaka, tetapi juga dapat membantu murid dan guru menyelesaikan tugas-

tugas dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan sekolah harus dapat menunjang proses pembelajaran. Agar dapat menunjang proses itu, pengadaan bahan pustaka hendaknya mempertimbangkan kurikulum sekolah serta minat para pemakainya, khususnya para murid dan guru.

Perpustakaan sekolah akan bermanfaat jika benar-benar mempelancar pencapaian tujuan proses pembelajaran di sekolah. Indikasi manfaat tersebut tidak hanya berupa tingginya prestasi murid, tetapi lebih jauh lagi, antara lain murid mampu mencari, menemukan, menyaring, dan menilai informasi; terbiasa belajar sendiri; terlatih bertanggung jawab; serta selalu mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi.

Landasan hukum berdirinya perpustakaan sekolah :

a. Dalam penjelasan pasal 35 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dinyatakan bahwa pendidikan tidak mungkin terselenggara dengan baik bilamana tenaga kependidikan dan peserta didik tidak didukung oleh sumber belajar yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan belajar yang bersangkutan. Salah satu sumber belajar yang amat penting, tetapi bukan satu-satunya, adalah perpustakaan yang memungkinkan para tenaga kependidikan dan peserta didik memperoleh kesempatan untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan yang diperlukan.

- b. Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang baru (UU Nomor 20 Tahun 2003), pasal 45, Tidak secara implisit menyebutkan agar setiap satuan pendidikan jalur pendidikan harus menyediakan perpustakaan sebagai sumber belajar. Namun, Undang-undang tersebut menyatakan bahwa “setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.” Karena perpustakaan secara implisit termasuk dalam pengertian sarana dan prasarana pendidikan, maka pengadaannya harus memenuhi ketentuan pasal tersebut.
- c. UU RI No 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Bab VII Jenis-jenis Perpustakaan, pasal 23. Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan; tertuang dalam PP 19/2005 SNP Bab VII Pasal 42 dinyatakan bahwa setiap satuan

pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan;

Selanjutnya pada Pasal 23 ayat 1-6 dinyatakan pula bahwa setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standard Nasional Pendidikan. Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik. b. mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.

Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan. Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Tujuan utama penyelenggaraan perpustakaan sekolah adalah meningkatkan mutu pendidikan bersama-sama dengan unsur-unsur sekolah lainnya. Sedangkan tujuan

lainnya adalah menunjang, mendukung, dan melengkapi semua kegiatan baik kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler, di samping dimaksudkan pula dapat membantu menumbuhkan minat dan mengembangkan bakat murid serta memantapkan strategi belajar mengajar.

Namun secara operasional tujuan perpustakaan sekolah bila dikaitkan dengan pelaksanaan program di sekolah, diantaranya adalah :

- a. memupuk rasa cinta, kesadaran, dan kebiasaan membaca.
- b. membimbing dan mengarahkan teknik memahami isi bacaan.
- c. memperluas pengetahuan para siswa.
- d. membantu mengembangkan kecakapan berbahasa dan daya pikir para siswa dengan menyediakan bahan bacaan yang bermutu.
- e. membimbing para siswa agar dapat menggunakan dan memelihara bahan pustaka dengan baik.
- f. memberikan dasar-dasar ke arah studi mandiri.
- g. memberikan kesempatan kepada para siswa untuk belajar bagaimana cara menggunakan perpustakaan dengan baik, efektif dan efisien, terutama dalam menggunakan bahan-bahan referensi.
- h. menyediakan bahan-bahan pustaka yang menunjang pelaksanaan program kurikulum di sekolah baik yang bersifat kurikuler, kokurikuler, maupun ekstra kurikuler.

Perpustakaan sekolah merupakan salah satu dari sarana yang efektif untuk

menambah pengetahuan melalui beraneka bacaan. Berbeda dari pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari secara klasikal di sekolah, perpustakaan menyediakan berbagai bahan pustaka yang secara individual dapat dimanfaatkan oleh peminatnya masing-masing.

Perpustakaan sekolah akan bermanfaat jika benar-benar mempelancar pencapaian tujuan proses pembelajaran di sekolah. Indikasi manfaat tersebut tidak hanya berupa tingginya prestasi murid, tetapi lebih jauh lagi, antara lain murid mampu mencari, menemukan, menyaring, dan menilai informasi; terbiasa belajar sendiri; terlatih bertanggung jawab; serta selalu mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi.

Berdasarkan tujuan perpustakaan sekolah, maka dapat dirumuskan beberapa fungsi perpustakaan, sebagai berikut :

- a. fungsi edukatif adalah menyediakan bahan pustaka yang sesuai dengan kurikulum yang mampu membangkitkan minat baca para siswa, mengembangkan daya ekspresi, mengembangkan kecakapan berbahasa, mengembangkan gaya pikir yang rasional dan kritis serta mampu membimbing dan membina para siswa dalam hal cara menggunakan dan memelihara bahan pustaka dengan baik.
- b. fungsi informatif, yang dimaksud dengan fungsi informatif adalah perpustakaan menyediakan bahan pustaka yang memuat informasi tentang berbagai cabang ilmu pengetahuan yang bermutu dan

- uptodate yang disusun secara teratur dan sistematis, sehingga dapat memudahkan para petugas dan pemakai dalam mencari informasi yang diperlukannya.
- c. fungsi administratif, ialah perpustakaan harus mengerjakan pencatatan, penyelesaian dan pemrosesan bahan-bahan pustaka serta menyelenggarakan sirkulasi yang praktis, efektif, dan efisien.
 - d. fungsi rekreatif, yang dimaksudkan dengan fungsi rekreatif ialah perpustakaan disamping menyediakan buku-buku pengetahuan juga perlu menyediakan buku-buku yang bersifat rekreatif (hiburan) dan bermutu, sehingga dapat digunakan para pembaca untuk mengisi waktu senggang, baik oleh siswa maupun oleh guru.
 - e. fungsi penelitian dalam fungsi ini perpustakaan menyediakan bacaan yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian

Keberadaan perpustakaan di sekolah/ madrasah dapat berfungsi sesuai dengan tuntutan perundang-undangan jika dikelola oleh pengelola perpustakaan, yang lazim disebut pustakawan dan/atau tenaga teknis perpustakaan. Pustakawan adalah "seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan" (UU No. 43 Bab I Ketentuan Umum Ayat 8). Selanjutnya pada bagian lain

dikemukakan bahwa Tenaga Perpustakaan adalah:

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standard nasional perpustakaan
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus penawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Terkait dengan pengelola perpustakaan sekolah/ madrasah, Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008, khususnya pasal 1, menyatakan bahwa standar tenaga perpustakaan sekolah/madrasah mencakup; (a) kepala perpustakaan sekolah/ madrasah dan (b) tenaga perpustakaan sekolah/ madrasah. Jadi, berdasarkan permen ini dapat disimpulkan bahwa pengelola

perpustakaan di sekolah/ madrasah terdiri atas dua unsur, yakni: kepala perpustakaan dan tenaga perpustakaan. Kepala perpustakaan adalah pimpinan yang mengelola perpustakaan, sedangkan tenaga perpustakaan adalah staf yang membantu pimpinan perpustakaan dalam pengelolaan perpustakaan di sekolah/ madrasah.

Kompetensi pengelola perpustakaan sekolah/ madrasah, selain kualifikasi yang sudah distandarkan, pengelola perpustakaan di sekolah/ madrasah juga harus memiliki kompetensi yang standar. Kompetensi yang harus dimiliki oleh ketua perpustakaan dan tenaga perpustakaan

sekolah/ madrasah meliputi dimensi kompetensi sebagai berikut.

- a. Dimensi Kompetensi Manajerial
- b. Dimensi Kompetensi Pengelolaan Informasi
- c. Dimensi Kompetensi Kependidikan
- d. Dimensi Kompetensi Kepribadian
- e. Dimensi Kompetensi Sosial
- f. Dimensi Kompetensi Pengembangan Profesi

Tenaga perpustakaan sekolah/ madrasah harus memiliki kompetensi-kompetensi sebagai berikut;

Tabel 2
Kompetensi Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah

No.	Dimensi Kompetensi	Kompetensi
1	Manajerial	a. Melaksanakan kebijakan b. Melakukan perawatan koleksi c. Melakukan pengelolaan anggaran dan keuangan
2	Pengelolaan Informasi	a. Mengembangkan koleksi b. Melakukan pengorganisasian informasi c. Memberikan jasa dan sumber informasi d. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi
3	Kependidikan	a. Memiliki wawasan kependidikan b. Mengembangkan keterampilan memanfaatkan informasi c. Melakukan promosi perpustakaan d. Memberikan bimbingan literasi informasi
4	Kepribadian	a. Memiliki integritas yang tinggi b. Memiliki etos kerja yang tinggi
5	Sosial	a. Membangun Hubungan sosial b. Membangun Komunikasi
6	Pengembangan	a. Mengembangkan ilmu

No.	Dimensi Kompetensi	Kompetensi
	profesi	b. Menghayati etika profesi c. Menunjukkan kebiasaan membaca

Penelitian ini mengarahkan dimensi kompetensi pengelolaan informasi kepada kemampuan dalam literasi informasi dimana tuntutan dari kemampuan setiap pengelola perpustakaan melek informasi dan menyelesaikan masalah dalam dunia pendidikan dengan bantuan perpustakaan dan teknologi informasi komunikasi yang ada di sekolah.

Literasi informasi

Literasi informasi pertama kali ditemukan oleh pemimpin American Information Industry Association Paul G.Zurkowski pada tahun 1974 dalam proposalnya yang ditujukan kepada The National Commission on Libraries and Information Science (NCLIS) di Amerika Serikat. Paul Zurkowski menggunakan ungkapan tersebut untuk menggambarkan "teknik dan kemampuan" yang dikenal dengan istilah literasi informasi yaitu kemampuan untuk memanfaatkan berbagai alat-alat informasi serta sumber-sumber informasi primer untuk memecahkan masalah mereka.

Istilah literasi informasi belum begitu familiar dan menjadi istilah yang asing di kalangan masyarakat. Saat ini literasi informasi biasanya selalu dikaitkan dengan penggunaan perpustakaan dan penggunaan teknologi informasi. Menurut *Dictionary for Library and Information Science* oleh Reitz (2004:356)

mendefinisikan literasi informasi sebagai berikut:

"Information literacy is skill in finding the information one needs, including and understanding of how libraries are organized, familiarity with resource they provide (including information formats and automated search tools), and knowledge of commonly used techniques. The concept also includes the skills required to critically evaluate information content and employ it affectively, as well as understanding of the technological infrastructure on which information transmission is based, including its social, political, and cultural context and impact".

Berdasarkan pendapat di atas dikatakan bahwa literasi informasi adalah kemampuan dalam menemukan informasi yang dibutuhkan, mengerti bagaimana perpustakaan diorganisir, familiar dengan sumber daya yang tersedia (termasuk format informasi dan alat penelusuran yang terotomasi) dan pengetahuan dari teknik yang biasa digunakan dalam pencarian informasi. Hal ini termasuk kemampuan yang diperlukan untuk mengevaluasi informasi dan menggunakannya secara efektif seperti pemahaman infrastruktur teknologi pada transfer informasi kepada orang lain, termasuk konteks sosial, politik dan budaya serta dampaknya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Shapiro (1996:31) bahwa:

Information literacy is refer to a new liberal art that extends from knowing how to use computers and access information to critical reflection on the nature of information itself, its technical infrastructure, and its social, cultural and even philosophical context and impact.

Berdasarkan pendapat di atas dikatakan bahwa literasi informasi ditujukan sebagai sebuah seni liberal baru dalam rangka mengetahui bagaimana menggunakan komputer, mengakses informasi dan berpikir secara kritis dalam informasi mereka, infrastruktur teknologi dalam kontes sosial, budaya, konteks filosofi dan dampaknya.

Menurut Bundy dalam Hasugian (2009:200) "Literasi informasi adalah seperangkat keterampilan yang diperlukan untuk mencari, menganalisis dan memanfaatkan informasi". Tidak jauh berbeda dengan pengertian di atas dalam laporan penelitian *America Library Association's Presidential Commite on Information Literacy (1989:1)* dikatakan bahwa "*information literacy is a set of abilities requiring individuals to recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectivelly the needeed information*". Dengan demikian dapat dikatakan bahwa literasi informasi adalah seperangkat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki seseorang untuk mengetahui kapan informasi dibutuhkan, kemampuan untuk menempatkan,

mengevaluasi dan menggunakan secara efektif kebutuhan informasinya

Berdasarkan perspektif pendidikan oleh Bruce (2003:3) dikatakan bahwa "*Information Literacy defines as the ability to access, evaluate, organise and use information in order to learn, problem-solve, make decisions in formal and informal learning contexts, at work, at home and in educational settings*". Dalam konteks ini literasi informasi merupakan sebuah kemampuan dalam mengakses, mengevaluasi, mengorganisir dan menggunakan informasi dalam proses belajar, pemecahan masalah, membuat suatu keputusan formal dan informal dalam konteks belajar, pekerjaan, rumah maupun dalam pendidikan.

Pertemuan yang diadakan di Mesir pada tanggal 6-9 November 2005 dalam *Alexandria Proclamation* yang diedit oleh Garner (2006:3) dikatakan bahwa 'literasi merupakan inti pembelajaran seumur hidup dan merupakan dasar bagi manusia di era digital ini'. Dalam laporan ini dikatakan bahwa literasi informasi adalah:

- Kemampuan dasar dalam menentukan kebutuhan informasi, menempatkan, mengevaluasi, membuat dan menerapkan informasi dalam konteks budaya dan sosial.
- Sebagai kunci dan pedoman seseorang dalam mengakses informasi secara efektif serta penggunaan dan pembuatan konten dalam mendukung pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelayanan manusia dan aspek lainnya.

- Kemampuan dasar dalam mempelajari teknologi informasi ini merupakan kemampuan yang sangat penting karena dengan memahami teknologi informasi maka akan semakin mudah seseorang memenuhi kebutuhan informasinya.

Berdasarkan berbagai definisi literasi informasi yang diuraikan di atas maka definisi literasi informasi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mencari, menemukan, menganalisis, mengevaluasi, mengkomunikasikan informasi yang berfungsi dalam pemenuhan kebutuhan informasi yang akan memecahkan berbagai masalah. Literasi informasi juga didukung oleh peranan perpustakaan dalam memperkenalkan istilah literasi informasi dan memperoleh kemampuan literasi informasi tersebut. Penguasaan teknologi informasi juga akan sangat memudahkan seseorang memiliki literasi informasi. Oleh karena itu literasi informasi merupakan proses pembelajaran seumur hidup yang akan menjadi bekal seseorang dalam mencari informasi bukan hanya dalam pendidikan.

Literasi informasi akan memudahkan seseorang untuk belajar secara mandiri dimana pun berada dan berinteraksi dengan berbagai informasi. Selain itu dengan memiliki literasi informasi maka para peserta didik mampu berpikir secara kritis dan logis serta tidak mudah percaya terhadap informasi yang diperoleh sehingga perlu mengevaluasi terlebih

dahulu informasi yang diperoleh sebelum menggunakannya.

Menurut Doyle dalam Wijetunge (2005:33) dengan memiliki keterampilan literasi informasi maka seorang individu mampu:

- a. Menentukan informasi yang akurat dan lengkap yang akan menjadi dasar dalam membuat keputusan.
- b. Menentukan batasan informasi yang dibutuhkan.
- c. Memformulasikan kebutuhan informasi.
- d. Mengidentifikasi sumber informasi potensial.
- e. Mengembangkan strategi penelusuran yang sukses.
- f. Mengakses informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien.
- g. Mengevaluasi informasi.
- h. Mengorganisasikan informasi.
- i. Menggabungkan informasi yang dipilih menjadi dasar pengetahuan seseorang.
- j. Menggunakan informasi secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut UNESCO (2005:1) literasi informasi memungkinkan seseorang untuk menafsirkan informasi sebagai pengguna informasi dan menjadi penghasil informasi bagi dirinya sendiri. UNESCO juga mengatakan bahwa tujuan literasi informasi adalah:

- a. Memungkinkan seseorang agar mampu mengakses dan memperoleh informasi mengenai kesehatan, lingkungan, pendidikan, pekerjaan mereka dan lain-lain.

- b. Memandu mereka dalam membuat keputusan yang kritikal mengenai kehidupan mereka.
- c. Lebih bertanggung jawab terhadap kesehatan dan pendidikan mereka.

Literasi informasi dibutuhkan di era globalisasi informasi agar pengguna memiliki kemampuan untuk menggunakan informasi dan teknologi komunikasi dan aplikasinya untuk mengakses dan membuat informasi. Misalnya kemampuan dalam menggunakan alat penelusuran internet. Berdasarkan tujuan yang diuraikan di atas, maka literasi informasi memiliki tujuan dalam membantu seseorang dalam memenuhi kebutuhan informasinya baik untuk kehidupan pribadi (pendidikan, kesehatan, pekerjaan) maupun lingkungan masyarakat.

Jelaslah bahwa dengan memiliki literasi informasi kita memiliki kemudahan-kemudahan dalam melakukan berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan informasi. Menurut Gunawan (2008:3) literasi informasi bermanfaat dalam persaingan di era globalisasi informasi sehingga pintar saja tidak cukup tetapi yang utama adalah kemampuan dalam belajar secara terus-menerus.

Menurut Adam (2009:1) bahwa terdapat beberapa manfaat literasi informasi yaitu:

- a. Membantu mengambil keputusan. Literasi informasi berperan dalam membantu memecahkan suatu persoalan. Kita harus mengambil keputusan ketika memecahkan masalah, sehingga dalam mengambil keputusan tersebut

seseorang harus memiliki informasi yang cukup.

- b. Menjadi manusia pembelajar di era ekonomi pengetahuan. Kemampuan literasi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan seseorang menjadi manusia pembelajar. Semakin terampil dalam mencari, menemukan, mengevaluasi dan menggunakan informasi, semakin terbukalah kesempatan untuk selalu melakukan pembelajaran sehingga dapat belajar secara mandiri.
- c. Menciptakan pengetahuan baru. Suatu negara dikatakan berhasil apabila mampu menciptakan pengetahuan baru. Seseorang yang memiliki literasi informasi akan mampu memilih informasi mana yang benar dan mana yang salah, sehingga tidak mudah saja percaya dengan informasi yang diperoleh.

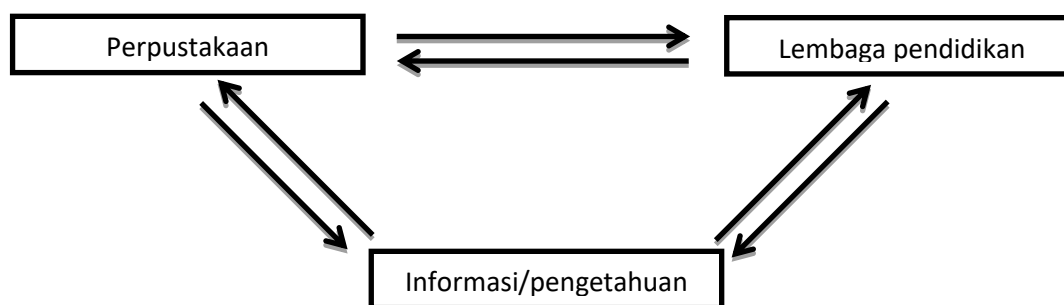
Perkembangan Kebutuhan Layanan Informasi di Perpustakaan Sekolah

Perpustakaan sebagai sumber daya informasi menjadi tulang punggung gerak majunya suatu institusi, terutama institusi pendidikan, tempat tuntutan untuk adaptasi terhadap perkembangan informasi sangat tinggi. Hal ini dikarenakan penggunaan (*user*) dominan dari kalangan akademisi yang kebutuhannya akan informasi begitu kuat sehingga mau tidak mau perpustakaan harus pula berfikir untuk berupaya mengembangkan diri guna memenuhi kebutuhan pengguna (*user*)

Perpustakaan menurut fungsinya memposisikan diri sebagai tempat

yang menyediakan berbagai informasi, baik yang berkaitan dengan sosial, politik, maupun ekonomi, dan informasi lainnya. Perpustakaan dan lembaga pendidikan sekarang ini seperti dua sisi mata uang. Keduanya akan menjadi bernilai jika keduanya ada, demikian pula dengan

informasinya. Perpustakaan dengan informasi juga tidak boleh dipisahkan sebab kekuatan perpustakaan ada pada informasi yang disajikannya. (Suwarno, 2010:16). Hubungan ketiga hal tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 1

Hubungan Perpustakaan dengan Informasi

Dari bagan di atas dapat dilihat bahwa perpustakaan memiliki kaitan dengan lembaga pendidikan. Hubungan itu secara kasat mata dapat dilihat dari pendekatan kelembagaan. Sedangkan, baik perpustakaan dan lembaga pendidikan, keduanya memiliki tugas yang sama, yaitu menyebarkan informasi. Perbedaannya, lembaga pendidikan memberikan informasi kepada para siswa melalui proses pembelajaran dengan informasi yang mengacu kepada kurikulumnya, sedangkan perpustakaan menyebarkan informasi secara langsung kepada pemustaka tanpa terikat langsung oleh kurikulum.

Selanjutnya beberapa dasawarsa terakhir ini, dunia teks mendapat tantangan dari temuan teknologi baru. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), perpustakaan pun dituntut untuk

mampu beradaptasi dengan hal tersebut. Perpustakaan pada era ini benar-benar dipilih sebagai salah satu pelaku perubahan (*agent of change*). Dikatakan demikian karena perpustakaan merupakan tempat berbagai informasi tersimpan didalamnya dan di sini pula sesungguhnya embrio intelektual diciptakan

Betapa tidak, dahulu perpustakaan yang dianggap sebagai tempat buku saja, kini berkembang menjadi pusat sumber daya informasi. Artinya, perpustakaan tidak lagi sebagai penyimpan buku semata, tetapi menjadi tempat yang mampu menciptakan nilai tambah bagi pemustaka, yang bermanfaat bagi orang lain. Perkembangan yang tampak sekarang adalah mulai digalakkannya perpustakaan digital. Berbondong-bondong perpustakaan di berbagai

belahan bumi mengemas ulang maupun mengembangkan koleksinya dalam bentuk digital.

Sulistyo-Basuki (1991) dalam (Suwarno, 2010:23) memberikan gambaran fungsi perpustakaan dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut:

1. Paradigma Lama

Fungsi perpustakaan dalam paradigma lama adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi simpan karya, yaitu fungsi perpustakaan untuk menyimpan buah karya masyarakat. Bentuk karya yang disimpan adalah yang berkaitan dengan buku, majalah, surat kabar, atau informasi terekam lainnya. Perpustakaan berfungsi sebagai “arsip umum” bagi produk masyarakat berupa buku dalam arti luas.
- b. Fungsi informasi, yaitu fungsi perpustakaan yang memberikan informasi yang dikelola perpustakaan kepada pemustakanya. Pada fungsi ini, anggota masyarakat yang memerlukan informasi dapat menerima atau menanyakannya kepada perpustakaan. Informasi yang dikelola berupa informasi mengenai tugas sehari-hari, pelajaran, atau informasi lainnya.
- c. Fungsi pendidikan, yaitu fungsi perpustakaan yang menunjang sistem pembelajaran yang dirancang oleh pemerintah. Perpustakaan merupakan sarana pendidikan nonformal dan informal.

Artinya, perpustakaan merupakan tempat belajar diluar bangku sekolah maupun tempat belajar dalam lingkungan pendidikan sekolah. Dalam hal ini, yang berkaitan dengan pendidikan nonformal adalah perpustakaan umum, sedangkan yang berkaitan dengan pendidikan informal adalah perpustakaan sekolah atau perpustakaan perguruan tinggi.

- d. Fungsi rekreasi, yaitu fungsi perpustakaan sebagai tempat yang menjadi rekreasi bagi pemustakanya dengan memberikan fasilitas yang baik dan bacaan yang sifatnya menghibur.
- e. Fungsi kultural, yaitu fungsi perpustakaan sebagai media dalam rangka mengembangkan berbagai kebudayaan yang dituangkan dalam suatu karya.

2. Paradigma Baru

Perkembangan zaman menuntut perubahan pola pikir masyarakat agar mampu beradaptasi dengan baik pada situasi dan kondisi yang ada. Demikian pula dengan paradigma perpustakaan yang dituntut mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Simpan saji karya, yaitu fungsi perpustakaan sebagai tempat menyimpan suatu karya, yang kemudian menyajikan karya tersebut sebagai informasi yang

- bisa diakses oleh pemustakanya. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No.43 Tahun 2007 bahwa koleksi perpustakaan diseleksi, dilayankan, disimpan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustakanya.
- b. Pusat Sumber Daya Informasi (SDI), yaitu fungsi perpustakaan yang menggali dan mengelola informasi, yang dapat menjadi bahan pemustaka untuk menghasilkan karya baru yang dapat diakses oleh pemustaka lainnya sebagai informasi yang baru. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No.43 Tahun 2007 bahwa koleksi perpustakaan diseleksi, dilayankan, disimpan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustakanya dengan memerhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini, terdapat dua pesan bagi pustakawan agar mengembangkan sistem cari – kelola informasi dan sekaligus cepat tanggap terhadap informasi baru.
- c. Pusat sumber belajar dan penelitian masyarakat, yaitu fungsi perpustakaan sebagai tempat belajar dan penelitian bagi masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang cerdas dan berpengetahuan luas. Pasal 2 UU No.43 Tahun 2007 menyebutkan bahwa perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat. Dalam ayat lain pun dijelaskan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Rekreasi dan rekreasi, yaitu fungsi perpustakaan sebagai tempat yang nyaman dan menyajikan informasi-informasi yang sifatnya menyenangkan, serta sebagai tempat yang menghasilkan kreasi (karya) baru yang berpijak dari karya-karya orang lain yang telah dipublikasikan.
- e. Mengembangkan kebudayaan, yaitu fungsi perpustakaan sebagai tempat mengembangkan kebudayaan melalui informasi yang disajikan, serta penanaman nilai-nilai kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan-kegiatannya, seperti pemutaran film dokumenter, belajar menari, les bahasa, *story telling*, dan lain-lain. Berkaitan dengan nilai, dikembangkan pula sikap pelayanan dengan semakin ditekankannya pustakawan untuk memahami karakter pemustaka. Tidak disangkal lagi bahwa *trend center* dari pelayanan ini merujuk pada pelayanan bank, yaitu tempat pelayanan terhadap nasabah yang berorientasi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan sangat diperhatikan

sehingga dikenal slogan pelayanan 4S, yaitu senyum, sapa, sopan, dan santun.

Mengingat peran pustakawan cukup penting maka perlu diberi jalan keluar untuk pengembangan SDM agar kesan buruk tidak terjadi lagi, untuk itu perlu kiranya peningkatan SDM dengan cara mengikuti seminar-seminar, workshop, pelatihan dan jenjang pendidikan S1 sampai S2 bahkan doktor. Menurut Zeitthemi dalam Kosasih (2009) kualitas layanan yang baik apabila pustakawan bersedia melayani pemustaka dengan senang hati, bersedia membantu, dan selalu menjemput bola, seperti bertanya kepada pemustaka sebelum mereka bertanya.

Kriteria untuk peningkatan kualitas layanan, maka pustakawan harus dapat memenuhi dimensi-dimensi sebagai berikut:

- a. *Tangibles* (berwujud), ruang dan peralatan harus nyaman dan tertata dengan baik dan pustakawan selalu berpenampilan menarik
- b. *Realibility* (kehandalan), kinerja pustakawan harus handal dan akurat sehingga meminimalisasi kesalahan
- c. *Responsiveness* (daya tanggap), pustakawan harus dapat menjawab pertanyaan pemustaka dalam waktu singkat dan jika tidak ditemukan dapat menunjukkan ke tempat
- d. *Competence* (pengetahuan dan keterampilan), pustakawan harus terlatih dalam memberi layanan kepada pemustaka
- e. *Access* (kemudahan hubungan), suasana perpustakaan harus menyenangkan dan tersedia sarana komunikasi sehingga pelacakan informasi dapat dilakukan dengan cepat
- f. *Courtesy* (perilaku), setiap pustakawan harus bersikap sopan, bersahabat, tanggap, dan ramah kepada pemustaka
- g. *Communication* (komunikasi), pustakawan harus mampu mendengarkan keinginan dan aspirasi pemustaka dan kesediaan menyampaikan informasi terbaru kepada pemustaka
- h. *Creadibility* (kejujuran), pustakawan harus menjunjung tinggi sifat kejujurannya baik terhadap diri sendiri, sesama pustakawan dan terhadap pemustaka
- i. *Security* (kemanan), Pelayanan perpustakaan harus menjamin keselamatan fisik, kenyamanan, dan keamanan barang-barang yang dianggap rasasia dan berharga
- j. *Understanding the Costamer* (memahami kebutuhan), pustakawan mampu menggali, mengidentifikasi, dan memahami kebutuhan pemustaka

Andaikan tenaga pengelola perpustakaan mampu menjabarkan kesepuluh kriteria tersebut maka layanan yang diberikan akan memuaskan pemustaka dan terwujud suatu layanan prima. Akan tetapi kenyatannya masih banyak dijumpai pustakawan yang bersikap masa bodoh, acuh tak acuh, kurang inisiatif, merasa pekerjaannya tidak cocok dan sebagainya.

Banyak argumentasi yang menyatakan bahwa layanan perpustakaan merupakan titik sentral kegiatan perpustakaan. Dengan kata lain, perpustakaan identik dengan layanan karena tidak ada perpustakaan jika tidak ada kegiatan layanan. (Nasution,1992:2).

Layanan perpustakaan adalah pemenuhan kebutuhan dan keperluan kepada pengguna jasa perpustakaan. Tugas yang mulia dan tujuan sebenarnya layanan perpustakaan adalah melayani pengunjung dan pengguna perpustakaan. Aktivitas layanan perpustakaan dan informasi berarti penyediaan bahan pustaka secara tepat dan akurat dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi bagi para pengguna perpustakaan. Perpustakaan memberikan layanan bahan pustaka kepada masyarakat adalah agar bahan pustaka tersebut yang telah diolah dapat dimanfaatkan dengan cepat oleh masyarakat pengguna perpustakaan.

Tujuan dan fungsi layanan perpustakaan sekolah adalah menyajikan informasi guna kepentingan pelaksanaan proses belajar mengajar dan rekreasi bagi siswa-siswi, dengan menggunakan bahan pustaka yang ada di perpustakaan tersebut. Kegiatan layanan di perpustakaan sekolah meliputi, peminjaman buku-buku, melayani kebutuhan pelajar dalam kelas, menyediakan sumber informasi bagi murid dan guru serta tenaga administrasi sekolah, membimbing siswa untuk mahir dalam mencari informasi secara mandiri.

Lasa Hs, Seorang kolomnis Perpustakaan dan Pustakawan

Universitas Gajah Mada Yogyakarta, membagi 5 (lima) fungsi perpustakaan sekolah adalah 1) Menunjang proses pendidikan; 2) Mengembangkan minat dan bakat siswa; 3) Mengembangkan minat baca guru dan siswa; 4) Menjadi sumber informasi; 5) Memperoleh bahan rekreasi kultural.

Dari kedua pendapat tentang fungsi dan tujuan perpustakaan sekolah tersebut di atas, ada salah satu fungsi yang sangat menarik dan perlu dikembangkan adalah sebagai fungsi sumber informasi. Fungsi ini memiliki multifungsi karena dapat dijadikan sebagai sarana belajar untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas sekolah bagi siswa-siswi dan juga dapat berfungsi menambah wawasan dan mewujudkan kreativitas bakat siswa-siswi yang dimiliki sehingga dapat menghasilkan prakarya sederhana bagi diri pribadi yang mandiri kelak.

Layanan perpustakaan merupakan salah satu kegiatan teknis yang pada pelaksanaannya perlu adanya perencanaan dalam penyelenggaraannya. Layanan perpustakaan akan berjalan dengan baik apabila akses layanan digunakan tepat dan sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

Pelatihan Tenaga Pengelola Perpustakaan

Pada saat kinerja yang ditampilkan oleh petugas perpustakaan kurang optimal, maka akan menjadi penghambat utama dalam melayani anggota dan pengunjung pada umumnya, yang pada gilirannya akan menghambat proses pencapaian tujuan lembaga secara keseluruhan. Sebagai bagian dari suatu sistem pengelolaan

pendidikan, eektivitas dari perpustakaan ini sangat terkait erat dan tergantung dari profesionalisme pengelola perpustakaan dan juga dari unit-unit terkait lainnya. Dimana hal tersebut menjadi sesuatu yang akan menentukan keberhasilan lembaga secara keseluruhan. Atas dasar itulah perlu kiranya diadakan suatu pelatihan tentang tenaga pengelola perpustakaan.

Pelatihan mengandung makna yang lebih khusus (spesifik), dan berhubungan dengan pekerjaan/tugas yang dilakukan seseorang. Sedangkan yang dimaksudkan praktis adalah, bahwa responden yang sudah dilatihkan dapat diaplikasikan dengan segera sehingga harus bersifat praktis. (Tjiptono, dkk, 1996)

Definisi pelatihan menurut *Center for Development Management and Productivity* adalah belajar untuk mengubah tingkah laku orang dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Pelatihan pada dasarnya adalah suatu proses memberikan bantuan bagi para karyawan atau pekerja untuk menguasai keterampilan khusus atau membantu untuk memperbaiki kekurangan dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Memperhatikan pengertian tersebut, ternyata tujuan pelatihan tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap saja, akan tetapi juga untuk mengembangkan bakat seseorang, sehingga dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Dalam pengembangan program pelatihan diperlukan tahapan atau langkah-langkah yang sistematis agar pelatihan dapat bermanfaat dan

mendatangkan keuntungan. Secara umum ada tiga tahap pada pelatihan yaitu tahap analisis kebutuhan, tahap pelaksanaan pelatihan dan tahap evaluasi. Dari tiga tahap atau fase tersebut, mengandung langkah-langkah pengembangan program pelatihan. Langkah-langkah yang umum digunakan dalam pengembangan program pelatihan, seperti dikemukakan oleh Werther (1989 : 287) yang pada prinsipnya meliputi (1) *need assessment*; (2) *training and development objective*; (3) *program content*; (4) *learning principles*; (5) *actual program*, (b) *skill knowledge ability of works*; dan (7) *evaluation*.

Pendapat ini sesuai dengan yang dikemukakan Simamora (1997 : 360) yang menyebutkan delapan langkah pelatihan yaitu

“(1). tahap penilaian kebutuhan dan sumber daya untuk pelatihan; (2) mengidentifikasi sasaran-sasaran pelatihan; (3) menyusun kriteria; (4) pre tes terhadap pemegang (5) memilih teknik pelatihan dan prinsip-prinsip proses belajar; (b) melaksanakan pelatihan; (7) memantau pelatihan; dan (8) membandingkan hasil-hasil pelatihan terhadap kriteria-kriteria yang digunakan”.

Analisis kebutuhan (*need assessment*) pelatihan merupakan langkah yang paling penting dalam pengembangan program pelatihan. Perumusan tujuan pelatihan dan pengembangan (*training and development objective*) hendaknya berdasarkan kebutuhan pelatihan yang telah ditentukan. Isi program (*program content*) merupakan perwujudan dari hasil penilaian kebutuhan dan materi

atau bahan guna mencapai tujuan pelatihan.

Prinsip-prinsip belajar (*learning principles*) yang efektif adalah yang memiliki kesesuaian antara metode dengan gaya belajar peserta pelatihan dan tipe-tipe pekerjaan, yang membutuhkan. Pada dasarnya prinsip belajar yang layak dipertimbangkan untuk diterapkan berkisar lima hal yaitu partisipasi, reputasi, relevansi, pengalihan, dan umpan balik. (Siagian, 1994 :190) Pelaksanaan program (*actual program*) pelatihan pada prinsipnya sangat bersifat situasional. Artinya dengan penekanan pada perhitungan kebutuhan organisasi dan peserta pelatihan, penggunaan prinsip-prinsip belajar dapat berbeda intensitasnya, sehingga tercermin pada penggunaan pendekatan, metode dan teknik tertentu dalam pelaksanaan proses pelatihan.

Keahlian, pengetahuan, dan kemampuan pekerja (*skill knowledge ability of workers*) sebagai peserta pelatihan merupakan pengalaman belajar (hasil) dari suatu program pelatihan yang diikuti. Pelatihan dikatakan efektif, apabila hasil pelatihan sesuai dengan tugas peserta pelatihan dan bermanfaat pada tugas pekerjaan. Dan langkah terakhir dari pengembangan program pelatihan adalah evaluasi (*evaluation*) pelatihan. Pelaksanaan program pelatihan dikatakan berhasil apabila dalam diri peserta pelatihan terjadi suatu proses transformasi pengalaman belajar pada bidang pekerjaan

Salah satu konsep pelatihan yang menitikberatkan pada peningkatan kompetensi dikenal dengan istilah pelatihan berbasis kompetensi. CAI

(Confederation of Australian Industry) dalam (Brown, 1991:4) memberikan batasan bahwa pelatihan yang berdasarkan pada kompetensi (CBT) adalah:

"CBT is a way of approaching vocational that place primary emphasis on what a person can actually do in the work places as a result of training (the outcomes) and as such represents a shift away from an emphasis on the process involved in training (the input). It is concerned with training to industry specific standards rather than with and individual's achievement relative to other in a group".

Konsep di atas mengandung arti bahwa CBT merupakan suatu cara pendekatan pelatihan kejuruan yang menekankan pada apa yang dilakukan oleh seseorang dalam dunia kerjanya setelah mengikuti pelatihan (*outcome*) dan sebagai representasi adanya pergeseran dari sebuah penekanan pada pemasukan proses ke dalam pelatihan (*input*). Hal ini lebih mengarah kepada pelatihan khususnya industri dibanding kepada individu dalam sebuah kelompok.

Revolusi' terbesar dalam dunia pelatihan dan pengembangan dalam beberapa tahun ini adalah peningkatan penggunaan internet untuk mengantarkan program pelatihan kepada pembelajar, baik individu maupun kelompok dalam organisasi. Pendekatan ini mulai secara sederhana dengan waktu sebenarnya, kontak e-mail antara pembelajaran sendiri, pembelajar program pembelajaran terbuka, dan pakar sentral atau manager/pelatih yang mendukung.

Materi pembelajaran ini dapat dalam bentuk teks tradisional, bahan e-mail atau halaman Web elektronik. Para pembelajar memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dari sumber; mengambil bagian dalam diskusi elektronik selanjutnya (dengan e-mail atau dalam format 'ruang ngobrol') bila diperlukan, sebelum pindah ke bagian lain dari program.

Berkaitan dengan peningkatan kompetensi pengelola perpustakaan yang mana harus memiliki kemampuan literasi informasi dalam pendidikan dengan bantuan perpustakaan dan teknologi informasi komunikasi yang ada di sekolah, maka pelatihan yang dilaksanakan harus memenuhi segala kebutuhan mereka serta menggunakan model pelatihan yang berkaitan dengan literasi informasi. Salah satu model literasi informasi yang paling banyak digunakan di sekolah-sekolah dan di lembaga pendidikan untuk meningkatkan kompetensi pengelola perpustakaan yaitu The Big6 yang dibuat oleh Michael Eisenberg dan Berkowitz, tahun 2000. The Big6 seperti namanya, memiliki 6 langkah literasi informasi yaitu *Task Definition, Information Seeking Strategies, Location and Access, Use of Information, Synthesis, dan Evaluation*.

Model literasi informasi berfungsi sebagai suatu panduan/acuan bagi seseorang manakala ia akan mempelajari dan memahami lebih lanjut tentang beragam kemampuan yang harus dikuasai dalam literasi informasi.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian awal ini adalah survei. Pendekatan survei adalah salah satu pendekatan penelitian yang pada umumnya digunakan untuk pengumpulan data yang luas dan banyak. Survei atau dalam bahasa Inggris "survey" adalah salah satu bentuk atau jenis penelitian yang banyak dikenal dan disebut-sebut. Namun demikian seringkali kita salah-kaprah dalam menggunakan istilah tersebut. *To survey* adalah bertanya pada seseorang dan lalu jawabannya direkam (Cooper dan Emory, 1995) Survey adalah satu bentuk teknik penelitian di mana informasi dikumpulkan dari sejumlah sampel berupa orang, melalui pertanyaan-pertanyaan; satu cara mengumpulkan data melalui komunikasi dengan individu-individu dalam suatu sampel (Zikmund,1997). Survey adalah metoda pengumpulan data melalui instrumen yang bisa merekam tanggapan-tanggapan responden dalam sebuah sampel penelitian (Nan Lin1976). Dalam penelitian ini peneliti melakukan survei terhadap para pengelola perpustakaan sekolah menengah atas yang berada di wilayah Kota dan Kabupaten Bandung.

Penarikan sampel mengacu pada pendapat Arikunto (1998: 107), yakni: 'Untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10 - 15% atau 20 - 25%'. Populasi dalam penelitian ini adalah

para pustakawan yang berada di SMA dan SMK (Negeri dan Swasta) di Kota dan Kabupaten Bandung dengan jumlah sekolah sebanyak 455 sekolah. Sedangkan penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 10% dari total populasi yaitu sejumlah 45 tenaga pengelola atau guru pengelola perpustakaan sekolah.

D. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Hasil penelaahan dilapangan tentang gambaran kompetensi para pustakawan berdasarkan telaah kesesuaian dengan peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2008 tentang tenaga perpustakaan sekolah yang harus dimiliki oleh setiap tenaga pengelola perpustakaan yang bertugas di perpustakaan sekolah, secara umum dapat uraikan sagai berikut;

- a. **Kompetensi Manajerial**
Dalam dimensi kompetensi managerial tercatat sekitar 96% pengelola perpustakaan memiliki kompetensi dalam melaksanakan kebijakan perpustakaan, 87% pengelola perpustakaan memiliki kompetensi dalam melakukan perawatan koleksi, dan hampir 90,5% pengelola perpustakaan memiliki kompetensi dalam melakukan pengelolaan anggaran dan keuangan
- b. **Kompetensi Pengelolaan Informasi**
Dimensi kompetensi pengelolaan informasi terurai sekitar 54% pengelola perpustakaan memiliki kompetensi dalam mengembangkan koleksi, sekitar 53% pengelola perpustakaan memiliki kompetensi dalam melakukan pengorganisasian informasi, dan berkisar 47% pengelola perpustakaan memiliki kompetensi dalam memberikan jasa dan informasi, selanjutnya 45% pengelola perpustakaan memiliki kompetensi dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi
- c. **Kompetensi Kependidikan**
Pada dimensi kependidikan sekitar 61% pengelola perpustakaan memiliki kompetensi dalam wawasan kependidikan, sekitar 51% pengelola perpustakaan memiliki kompetensi dalam mengembangkan keterampilan memanfaatkan informasi, sementara sekitar 53% pengelola perpustakaan memiliki kompetensi dalam melakukan promosi perpustakaan, sekitar 48% pengelola perpustakaan memiliki kompetensi dalam memberikan bimbingan literasi informasi
- d. **Kompetensi Kepribadian**
Menelaah dimensi kompetensi kepribadian tergambar data sekitar 60% pengelola perpustakaan memiliki kompetensi mengenai integritas yang tinggi, sekitar 60% pengelola perpustakaan memiliki kompetensi mengenai etos kerja yang tinggi
- e. **Kompetensi Sosial**
Dalam dimensi kompetensi sosial terurai sekitar 59% pengelola perpustakaan memiliki kompetensi dalam membangun hubungan social, dan sekitar 56% pengelola perpustakaan memiliki kompetensi dalam membangun komunikasi

- f. Kompetensi Pengembangan Profesi
Dalam dimensi kompetensi pengembangan profesi sekitar 48% pengelola perpustakaan memiliki kompetensi dalam mengembangkan ilmu, sekitar 58% pengelola perpustakaan memiliki kompetensi dalam menghayati etika, sekitar 60% pengelola perpustakaan memiliki kompetensi dalam meningkatkan kebiasaan membaca

Selanjutnya, pelatihan yang telah diikuti dipaparkan berdasarkan sebaran jumlah pengelola perpustakaan yang membutuhkan untuk mendapatkan pelatihan yang diharapkan, dari jumlah sebaran data pengelola perpustakaan di wilayah kota dan kabupaten Bandung dan kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi pustakawan bekisar 45% para pengelola perpustakaan tersebut yang telah mengikuti pelatihan.

Program pelatihan yang ada dan telah diberikan kepada tenaga pengelola perpustakaan sekolah meningkatkan kompetensi tenaga pengelola perpustakaan terutama dalam kompetensi literasi informasi yang termasuk dalam dimensi kompetensi pengelolaan informasi diperoleh gambaran sebagai berikut:

Di wilayah kota Bandung terdapat sekitar 57% telah mengikuti pelatihan pengelolaan perpustakaan, 16% telah mengikuti pelatihan pengelolaan perpustakaan berbasis IT dan 27 % belum mengikuti pelatihan. Sedangkan untuk wilayah kabupaten Bandung berkisar 55,5% telah mengikuti

pelatihan pengelolaan perpustakaan dan 44,5% belum mengikuti pelatihan.

Program pelatihan berkaitan dengan literasi informasi yang dibutuhkan pustakawan sekolah hampir 100% responden yang berada di wilayah kota Bandung dan kabupaten Bandung memerlukan pelatihan pengelolaan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Program pelatihan yang diikuti oleh para pengelola perpustakaan tersebut ditawarkan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat Propinsi Jawa Barat. Pada tahun 2009 untuk sekolah Tingkat SMA/SMK bentuk pelatihan yang dilaksanakan adalah pelatihan untuk tenaga pengelola perpustakaan dengan pemateri dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan daerah (BAPUSIPDA) dan tenaga edukatif dari perguruan tinggi Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.

Lingkup materi yang dipelajari dalam pelatihan adalah; Strategi Pemberdayaan Perpustakaan Sekolah dalam mewujudkan budaya baca masyarakat (civitas sekolah), Kebijakan Penyelenggaraan Perpustakaan, Pembinaan koleksi bahan pustaka, Pengantar layanan Simulasi perpustakaan, Pengantar katalogisasi, Pembelajaran dan Sumber belajar, Teori dan Praktek Klasifikasi.

Kebutuhan pelatihan dari sekolah tingkat SMA/SMK Negeri di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung meliputi:

- (1) Pelatihan untuk tenaga pengelola perpustakaan, karena sebagian dari pengelola perpustakaan belum pernah mengikuti pelatihan sama

sekali. Pelatihan tersebut perlu dilakukan berkesinambungan dan terus menerus disebabkan seringkali terjadi rotasi jabatan/posisi untuk para pengelola perpustakaan.

- (2) Pelatihan untuk pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, hal ini disebabkan sebagian besar sekolah negeri sudah memiliki perangkat komputer ditambah internet yang disediakan di perpustakaan, namun pengembangannya baru untuk penyediaan bahan ajar secara *offline*, dan penggunaan internet hanya untuk *browsing dan surfing* secara umum.

Apabila di lihat secara keseluruhan masih ada pengelola perpustakaan yang belum mengikuti pelatihan dikarenakan mereka baru melaksanakan tugas di perpustakaan. Selain itu ada juga yang telah mengikuti pelatihan pengembangan software perpustakaan. Semua itu dikembalikan lagi pada pihak sekolah, apakah terdapat kepedulian dan keinginan untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pustakawan serta mengembangkan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar atau tidak dari kepala sekolah pada khususnya dan warga belajar di sekolah tersebut pada umumnya.

E. Pembahasan

Secara umum berdasarkan gambaran data yang diperoleh tentang kompetensi pengelola perpustakaan sekolah/ madrasah, masih bervariasi dalam pemilikan kualifikasi yang distandarkan. Khusus dalam penelitian pendahuluan ini untuk menjawab pemenuhan kompetensi literasi informasi, akan dilakukan pengembangan model pelatihan yang sesuai bagi pengelola perpustakaan. Sebelumnya perlu dilakukan kajian analisis kebutuhan dalam pemenuhan kompetensi terkait.

Menurut peneliti bila mengacu pada Permen No 25 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah, yang perlu dikembangkan untuk pemenuhan kompetensi literasi informasi adalah dua dimensi kompetensi yaitu dimensi kompetensi pengelolaan informasi, dimensi kompetensi kependidikan. Literasi informasi yang dimaksud adalah bagaimana seorang pengelola perpustakaan dapat menjembatani kebutuhan guru dan siswa dalam pemenuhan informasi yang menjadi sumber pemecahan permasalahan dalam proses pembelajaran. Sejalan dengan perspektif pendidikan oleh Bruce (2003:3) dikatakan bahwa "*Information Literacy defines as the ability to access, evaluate, organise and use information in order to learn, problem-solve, make decisions in formal and informal learning contexts, at work, at home and in educational settings*". Dimana dalam konteks ini literasi informasi merupakan sebuah kemampuan dalam mengakses, mengevaluasi, mengorganisir dan

menggunakan informasi dalam proses belajar, pemecahan masalah, membuat suatu keputusan formal dan informal dalam konteks belajar, pekerjaan, rumah maupun dalam pendidikan.

Kebutuhan mengembangkan kompetensi kependidikan dan pengelolaan informasi dari para pengelola perpustakaan adalah hal yang mutlak, penggabungan dua kompetensi ini menjadi sebuah kompetensi literasi informasi yang merupakan keterampilan esensial di abad *digital* bagi pengguna perpustakaan akademik yang terdiri dari guru dan siswa merupakan suatu bentuk kolaborasi kemampuan yang menjadi keharusan untuk dimiliki oleh tenaga pengelola perpustakaan.

Apalagi saat ini dunia persekolahan dibanjiri dengan masuknya generasi *digital native*. Siswa dengan *digital native* memiliki karakteristik yang berbeda dalam memilih sumber media pencarian dan menggunakan informasi. Mereka sangat terampil dalam memilih *gadget* dan memanfaatkannya untuk menelusur dan menggunakan informasi yang dibutuhkan, namun secara umum masih rentan dengan kebenaran informasi yang mereka dapatkan. Sementara kondisi guru atau para pengelola perpustakaan dengan fenomena ini semakin merasa bertambah tugas dan tuntutan yang harus diemban.

Sedianya disetiap sekolah memiliki tenaga pengelola perpustakaan yang secara berkala berupaya untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan literasi informasi kepada para pemustakanya, namun secara

umum juga tidak dapat dipungkiri bahwa tenaga pengelola perpustakaan kita adalah para guru yang ditempatkan dan diberi tugas tambahan sebagai pengelola perpustakaan karena kekurangan beban mengajar disekolah, artinya perpustakaan sekolah tidak memiliki orang yang ahli dalam mengelola perpustakaan.

Dengan kondisi tersebut guru dengan kemampuan mengajar bidang studi tertentu namun masih memiliki keinginan dan kemampuan untuk mengembangkan diri dalam keilmuan dan praktis di perpustakaan perlu mendapatkan wadah dan bentuk pengembangan kompetensi yaitu melalui pelatihan dengan berbagai bentuk.

Sejalan dengan gambaran data yang diperoleh untuk wilayah Kota dan kabupaten Bandung bahwa pelatihan untuk tenaga pengelola perpustakaan, ada yang telah mengikuti dan ada yang belum pernah mengikuti pelatihan sama sekali, pelatihan tersebut perlu dilakukan berkesinambungan dan terus menerus seiring dengan terjadi rotasi jabatan/posisi untuk para pengelola perpustakaan. Perlu di telaah bentuk pelatihan yang menitikberatkan pada peningkatan kompetensi dikenal dengan istilah pelatihan berbasis kompetensi. CAI (Confederation of Australian Industry) dalam (Brown, 1991:4) memberikan batasan bahwa pelatihan yang berdasarkan pada kompetensi (CBT) mengandung arti bahwa CBT merupakan suatu cara pendekatan pelatihan kejuruan yang menekankan pada apa yang dilakukan oleh seseorang dalam dunia kerjanya setelah mengikuti pelatihan (*outcome*)

dan sebagai representasi adanya pergeseran dari sebuah penekanan pada pemasukan proses ke dalam pelatihan (input).

Pelatihan dalam bentuk yang lebih fleksibel dari sisi waktu, tempat dan dana dirasa harus dikembangkan untuk dapat diikuti dan dilakukan oleh tenaga pengelola perpustakaan sehingga dapat mewujudkan kemampuan literasi informasi dari para pengelola perpustakaan tersebut dan diakhir dapat terwujud kemampuan dalam menggunakan informasi dan menilai informasi dalam proses penyelesaian permasalahan dalam pembelajaran yang dihadapi oleh guru dan siswa.

Peatihan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi perlu dilakukan, hal ini disebabkan sebagian besar sekolah negeri sudah memiliki perangkat komputer ditambah internet yang disediakan di perpustakaan, namun pengembangannya baru untuk penyediaan bahan ajar secara *offline*, dan penggunaan internet hanya untuk *browsing dan surfing* secara umum.

F. Sumber Rujukan

- Adam. (2008). *Literasi Informasi*. Diakses tanggal 10 Maret 2012. [<http://perpus.umy.ac.id/2009/02/19/literasi-informasi/>].
- American Library Association (ALA). (1989). *Presidential Committee on Information Literacy: Final Report*. Diakses tanggal 10 Maret 2012. [<http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/ublications/whitepapers/presidential.cfm>].
- Association of College and Research Libraries. (2000). *Information Literacy Competency Standards for Higher Education*. [Online]. Retrieved 28 Desember 2012 from http://www.ala.org/content/NavigationMenu/ACRL/Standards_and_Guidelines/Information_Literacy_Competency_Standards_for_Higher_Education.htm
- Australian National Training Authority. (2003). *Developing e-learning content (Australian Flexible Learning Framework Quick Guide Series)*. <http://flexiblelearning.net.au/guides/content.pdf>. Diakses: 2 Juni 2011
- Bruce, Christine, Philip, Candy dan Kelmot, Klaus. (2003). *Seven Faces of information Literacy: Towards Inviting Students into new Experiences*. <http://crm.hct.ac.ae/events/archive/2003/speakers/bruce.pdf>. (3 Maret 2012)
- Garner (2006). *High-Level Colloquium on Information Literacy and Lifelong Learning* < www.ifla.org/III/wsis/High-Level-Colloquium.pdf>. (5 Desember 2011)
- Gunawan, A.W,dkk. (2008). *7 Langkah Literasi Informasi: Knowledge Management*. Jakarta: Universitas Atmajaya
- Hasugian, J. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Medan: USU Press.

- Kosasih, AA. (2009) *Tata Ruang, Perabot dan Perlengkapan Perpustakaan Sekolah*. Malang: Perpustakaan Universitas Negeri Malang. Diakses dari www.google.com tanggal 13 April 2010
- Lasa, HS. 2005. *Manajemen Perpustakaan*. Yogyakarta : Gama Media.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Reitz M, Joan. (2004). *Dictionary Library and Information Science*. America: Libraries unlimited
- Shapiro, Jeremy J. dan Hughes, Sheller K. (1996). *Information Literacy as a Liberal Art: Anlightenment Proposals for a New curriculum*. < <http://www.educause.edu/pub/er/review/reviewArticles/31231.html>>. (10 Maret 2012)
- Siagian, SP. (1994). *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung
- Simamora, H, (1997). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Bagian Penerbitan STIE
- Suharsimi Arikunto, (1998), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suwarno, W. (2010). *Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Tjiptono, F dan Diana, A, (1998), *Total Quality Management*, Yogyakarta : Andi offset.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
- Wether Jr., W.B.E.Davis, Keith, (1997) *Human Resource And Personel Management*, Fifth Edition Mc. Graw Hill, Inc
- Wijetunge, Pradeepa dan Alahakoon, Uditha. (2005). *Empowering 8: the Information Leteracy Model Developed in Srilanka to Underpin Changing Education Paradigms of Srilanka*. www.cmb.ac.lk/academic/institute/nilis/reports/informationliteracy.pdf . (30 Agustus 2011)
- Zurkowski, P. G. (1974). *The Information Service Environment: Relationships and Priorities*. Washington DC: National Commission on Libraries and Information Sciences.

— —